

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2024



**Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Kota Bandar Lampung
2024**



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia_Nya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 dapat tersusun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan pedoman dan pengendali pembangunan daerah di bidang Pengawasan atau sebagai arah dalam pencapaian visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan/penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terimakasih pada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini.

Bandar Lampung, Januari 2024

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH**

Dr. MUHAMAD NUR RAM'DHAN, M.Acc., Akt., CGAE, CA
NIP. 197410017 200501 1 006



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas dan Fungsi	2
1.3 Struktur Organisasi	3
Bab II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	5
2.1 Visi dan Misi	5
2.2 Tujuan dan Sasaran	7
Bab III Komponen Rencana Strategis BPKAD Kota Bandar Lampung	9
3.1 Indikator Kinerja	10
Bab IV Penutup	12



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitemate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelegaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Instruksi Presiden No.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-undang No.22 tahun 1999 (sudah direvisi menjadi UU 32 Tahun 2004) termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*), serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan



mempertanggungjawabkannya melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2024 sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandar Lampung Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 serta berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Tugas dan Fungsi Badan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung

Sesuai Peraturan Walikota No. 66 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung, BPKAD mempunyai tugas Pokok membantu Walikota melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan, investasi pinjaman daerah dan aset daerah. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut BPKAD Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi :



- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, investasi pinjaman daerah dan aset daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai tugas lingkungannya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

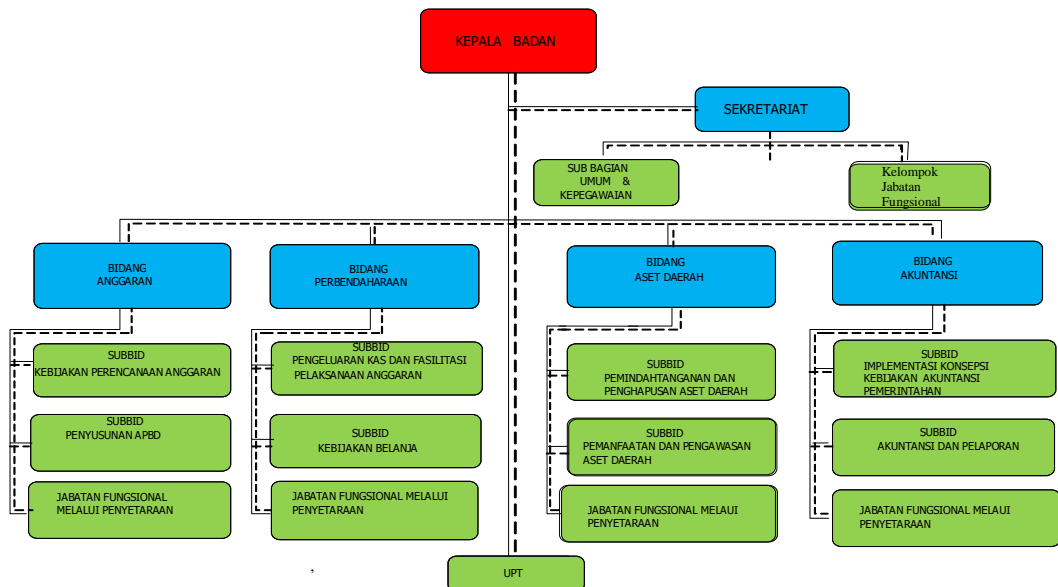
- a) Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
- b) Bidang Anggaran, membawahkan :
 1. Sub Bidang Kebijakan Perencanaan Anggaran;
 2. Sub Bidang Penyusunan APBD;
 3. Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.
- c) Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pengeluaran Kas dan Fasilitasi Pelaksanaan Anggaran ;
 2. Sub Bidang Kebijakan Belanja;
 3. Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.
- d) Bidang Aset Daerah, membawahkan :



1. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengawasan Aset Daerah;
 2. Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset Daerah;
 3. Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
- e) Bidang Akuntansi, membawahkan :
1. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 2. Sub Bidang Implementasi Konsepsi Kebijakan Akuntansi Pemerintahan;
 3. Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan.

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH





BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandar Lampung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih, Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandar Lampung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

2.1. VISI dan MISI

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2021-2026 dengan berorientasi terhadap hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi. Untuk itu disusun arah kebijakan dan strategi berisi uraian mengenai rumusan fokus prioritas dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan RPJMD sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah agar efektif, efisien dan akuntabel.



Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandar Lampung dalam menyusun Rencana Strategis berpedoman pada RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

MISI KOTA BANDAR LAMPUNG yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1. Misi 1 :**
Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
- 2. Misi 2 :**
Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan masyarakat
- 3. Misi 3 :**
Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial
- 4. Misi 4 :**
Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
- 5. Misi 5 :**
Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius
- 6. Misi 6 :**
Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab untuk mendukung investasi.

Berdasarkan misi tersebut di atas, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset mengacu kepada Misi ke-6 yaitu “Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola



pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab untuk mendukung investasi”

Sedangkan tujuan dalam misi tersebut yang ditetapkan untuk diemban oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam RPJMD Perubahan adalah sebagai berikut:

Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan inovatif

Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan

2.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari satu tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor – faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan misi Sasaran merupakan tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan kedalam bentuk yang lebih spesifik, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai , sinerjik dan berkelanjutan.

Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu sasaran tahunan dan sasaran lima tahun. Sasaran tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (dinyatakan dalam rencana kinerja tahunan/RKT) sasarannya harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi.



Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandar Lampung Tahun 2022, secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1

TUJUAN, SASARAN, DAN STRATEGI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG

Tujuan	Sasaran	Strategi
Tersusunnya kualitas perencanaan dan penganggaran sesuai dengan aturan jadwal waktu serta Penatausahaan keuangan daerah yang efektif dan efisien.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Keuangan	Peningkatan kualitas penyelenggaraan Urusan Keuangan
	Ketepatan waktu penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan keuangan daerah	Peningkatan kualitas penyusunan APBD dengan bersinergi dengan SKPD Perencanaan dan Badan Anggaran Legislatif (DPRD) guna mewujudkan APBD yang partisipatif, tepat waktu dan tepat kualitas
Terwujudnya laporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.	Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Peningkatan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah melalui pembinaan dari Pihak APIP daerah, Pemerintah Pusat, Badan Pemeriksa Keuangan dan berkoordinasi dengan Akademisi, Organisasi Akuntansi, serta Pemerintah daerah lainnya untuk memperoleh evaluasi yang bermanfaat guna mewujudkan Laporan Keuangan Daerah yang beropini Wajar Tanpa Pengecualian dengan kaidah akuntansi berbasis Akrual
	Opini Wajar Tanpa Pengecualian BPK	
Terwujudnya Penatausahaan dan Pemanfaatan Aset Daerah	Tingkat Penatausahaan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatkan kemampuan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD bersama Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Barang melalui pendampingan dan pembinaan secara rutin dan berkala



BAB III

KOMPONEN RENCANA STRATEGIS

BPKAD KOTA BANDAR LAMPUNG

Perencanaan kinerja ini merupakan proses penyusunan rencana kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandar Lampung, yang akan dilaksanakan oleh seluruh aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung melalui berbagai kegiatan tahunan.

Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini memuat informasi tentang : sasaran yang ingin dicapai; indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya; program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi / sektor lain.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini dalam pelaksanaannya didukung oleh beberapa komponen – komponen antara lain sasaran dan indikator kinerja.



Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

3.1 Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

3.1.1 Rencana Kinerja

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dikembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktivitas Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandar Lampung masing-masing dikembangkan kedalam kebijakan dan program. Sementara itu kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan dituangkan kedalam perencanaan dan perjanjian Kinerja, dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini.



Tabel 3.1

**SASARAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Keuangan	Hasil Penilaian akuntabilitas kinerja OPD oleh inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai sakip OPD)	Nilai	BB
Ketepatan waktu penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan keuangan daerah	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBD-P	Hari	60
		Hari	30
Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Ketepatan waktu penyusunan LKPD yang sesuai dengan SAP dan peraturan yang berlaku	Hari	90
	Ketepatan waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah secara ketentuan	Hari	2
Opini Wajar Tanpa Pengecualian BPK	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Predikat	WTP
Tingkat Penatausahaan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundang- Undangan	Kesesuaian data Total BMD dengan aktiva tetap di neraca Pemerintah Kota	Persen	100



BAB IV

PENUTUP

Dokumen Review Rencana Kinerja Tahunan tahun 2024 ini merupakan komitmen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandar Lampung dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2024 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman Perencanaan Kinerja oleh masing-masing pejabat dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung pada Tahun 2024 dalam melaksanakan misi guna dapat mewujudkan visi.

Demikian kami sampaikan Rencana Kinerja Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024, sehingga dapat memberikan informasi yang memadai mengenai rencana maupun target tahunan yang hendak diwujudkan.

Bandar Lampung, Januari 2024

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH,**

Dr. MUHAMAD NUR RAM'DHAN, M.Acc., Akt., CGAE, CA
NIP. 197410017 200501 1 006



LAMPIRAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024

Tujuan	Indikator tujuan	2024	Sasaran	Indikator Sasaran	IKU	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Capaian	
								Satuan	Target
Terusunnya kualitas perencanaan, penganggaran dan laporan keuangan sesuai dengan aturan jadwal waktu, transparan, akuntabel serta Penatausahaan keuangan daerah yang efektif dan efisien.	Tepat kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	100%	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Keuangan	Hasil Penilaian akuntabilitas kinerja OPD oleh inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai saki OPD)	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBD-P	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan	%	98
	Tepat penatausahaan keuangan daerah	100%	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Ketepatan penyusunan RAPBD dan RAPBD-P	SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah secara ketentuan	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	%	100
				Ketepatan waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah secara ketentuan	Ketepatan waktu penyusunan LKPD yang sesuai dengan SAP dan peraturan yang berlaku	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	2
				Ketepatan waktu penyusunan LKPD yang sesuai dengan SAP dan peraturan yang berlaku	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	dokumen	1
				Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	dokumen	1
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	1
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan	3
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan	5
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan yang tertib	%	100
							Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	%	100
						Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	127
						Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	1240
						Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan /triwulanan / semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan /triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	laporan	13
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	100
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	7
						Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan yugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	7
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD	%	98
						Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah paket instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	3
						Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	4
						Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	6
						Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	7

						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	9
						Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	6
						Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	laporan	10
						Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	10
						Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	dokumen	8
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan inventaris kantor	%	98
						Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	8
						Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan	unit	5
						Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan jasa penunjang kebutuhan OPD	%	98
						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	1
						Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	1
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Inventaris kantor yang tersedia	%	98
						Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	1
						Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional /lapangan yang dibayarkan pajaknya dan perizinannya	unit	18
						Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	10
						Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1
						Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas LKPD	Opini	WTP
							Persentase ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBD-P	%	100
							Persentase Ketepatan waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah secara ketentuan	%	100
						Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	%	100
						Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	dokumen	2
						Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	dokumen	2
						Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	Dokumen	2
						Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Jumlah peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2
						Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Dokumen	2
						Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan	dokumen	3
						Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	Jumlah dokumen hasil Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	dokumen	3

						Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	%	100
						Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	dokumen	12
						Penyiapan, pelaksanaan, pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	dokumen	3
						Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	Jumlah dokumen hasil Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	dokumen	12
						Koordinasi penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyeteroran perhitungan fihak ketiga (PFK)	Jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyeteroran perhitungan fihak ketiga (PFK) dan laporan hasil koordinasi dalam rangka penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyeteroran perhitungan fihak ketiga (PFK)	laporan	5
						Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	Jumlah dokumen hasil Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	dokumen	12
						Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	dokumen	54
						Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	Jumlah petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	dokumen	15
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Opini BPK atas LKPD	Opini	WTP
						Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	laporan	14
						Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD, dan laporan keuangan pemerintah daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD, dan laporan keuangan pemerintah daerah yang terkonsolidasi	laporan	1
						Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	Jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	dokumen	5
						Koordinasi sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Jumlah dokumen hasil Koordinasi sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	dokumen	1
						Pembinaan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pemerintah kab/kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pemerintah kab/kota	orang	162
						Pembinaan pengelolaan keuangan BLUD Kab/kota	Jumlah BLUD Kab/Kota yang dibina	lembaga	32

						Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan urusan pinjaman daerah, hibah dan bansos, dan urusan darurat	%	100
						Analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman pemerintah daerah	Jumlah laporan hasil Analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman pemerintah daerah	laporan	1
						Analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah	Jumlah laporan hasil Analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah	laporan	6
						Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Jumlah laporan hasil Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	12 laporan	12
						Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Jumlah laporan hasil Pengelolaan dana darurat dan mendesak	12 laporan	12
						Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah	Persentase Pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah	100%	100
						Inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah	Jumlah dokumen hasil inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah	dokumen	4
						Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	Jumlah dokumen hasil implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	dokumen	12
						Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota	orang	30
Terwujudnya Penatausahaan dan Pemanfaatan Aset Daerah	Meningkatnya penatausahaan aset daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	Tingkat Penatausahaan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Kesesuaian data Total BMD dengan aktiva tetap di neraca Pemerintah Kota	Kesesuaian data Total BMD dengan aktiva tetap di neraca Pemerintah Kota	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase kesesuaian data rincian total BMD dengan aktiva tetap di neraca Pemerintah Daerah	%	100
							Persentase penilaian dan penghapusan BMD sesuai dengan usulan OPD	%	100
						Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah	%	100
						Penyusunan standar harga	Jumlah standar harga yang disusun	dokumen	1
						Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah	Jumlah dokumen RKBMD pengadaan dan RKBMD pemeliharaan	Dokumen	2
						Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan barang milik daerah	laporan	1
						Pengamanan barang milik daerah	Jumlah laporan hasil Pengamanan barang milik daerah	laporan	1
						Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	laporan	1
						Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	Persentase adanya hasil penilaian aset untuk pemindah tanganan dan penghapusan aset daerah	dokumen	20
						Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Laporan mutasi barang daerah dan Daftar Mutasi barang daerah	laporan	2
						Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	dokumen	1

Bandar Lampung, Januari 2024
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Dr. MUHAMAD NUR RAM'DHAN, M.Acc., Akt., CGAE., CA
NIP. 19741007 200501 1 006

